

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	23
1.3. Tujuan Penelitian.....	24
1.4. Manfaat Penelitian.....	25
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	25
1.4.2. Manfaat Praktis.....	25
1.5. Keaslian Penelitian/ Originalitas.....	26
1.6. Sistematika Penulisan.....	35
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>37</b>
2.1. Landasan Teori.....	37
2.1.1. Teori Kedaulatan Rakyat .....	38
2.1.2. Teori Pemisahan atau Pembagian Kekuasaan .....	43
2.1.3. Teori Hierarki Perundang-undangan.....	53
2.2. Landasan Konseptual.....	67
<b>BAB III: METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>94</b>
3.1. Bentuk dan Pendekatan Penelitian.....	96
3.1.1. Bentuk Penelitian.....	96
3.1.2. Pendekatan Penelitian.....	99

3.1.2.1. Pendekatan Undang-Undang.....	99
3.1.2.2. Pendekatan Perbandingan.....	100
3.1.2.3. Pendekatan Historis.....	102
3.2. Bahan Hukum.....	104
3.2.1. Bahan Hukum Primer.....	106
3.2.2. Bahan Hukum Sekunder.....	106
3.2.3. Bahan Hukum Tersier.....	107
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	107
3.4. Jenis Data.....	109
3.5. Pengolahan dan Analisa Data.....	110
<b>BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA.....</b>	<b>114</b>
4.1. Keberadaan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	114
4.1.1. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan MPR Menurut UUD 1945.....	114
4.1.1.1. Sebelum Amendemen UUD 1945.....	114
4.1.1.2. Setelah Amendemen UUD 1945 (Masa Reformasi).....	131
4.1.2. Perkembangan Aturan tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	151
4.1.2.1. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966.....	154
4.1.2.2. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000.....	157
4.1.2.3. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.....	158

4.1.2.4. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022).....	161
4.2. Keberlakuan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dalam Sistem Hukum Indonesia.....	166
4.2.1. Keberlakuan Ketetapan MPR(S) sebagai Peraturan Perundang-undangan.....	166
4.2.1.1. Aspek Filosofis.....	166
4.2.1.2. Aspek Sosiologis.....	169
4.2.1.3. Aspek Yuridis.....	173
4.2.2. Keberlakuan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	178
4.2.3. Keberlakuan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Ditinjau Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003.....	196
4.2.3.1. Landasan Hukum Peninjauan Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR.....	196
4.2.3.2. Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003.....	215
4.2.3.3. Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003.....	224
4.2.3.4. Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003.....	242
4.3. Keberadaan Ketetapan MPR dalam Sistem Hukum Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945.....	243
4.3.1. Berdasarkan Teori serta Hubungan Antara Pancasila, UUD 1945 dan Ketetapan MPR.....	243
4.3.2. Berdasarkan Perbandingan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan MPR Dengan Lembaga Sejenis	

di Negara Lain.....	298
4.3.2.1. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Lembaga Sejenis MPR di Amerika Serikat.....	298
4.3.2.2. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Lembaga Sejenis MPR di Republik Rakyat Tiongkok ("RRT").....	306
4.3.2.3. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Lembaga Sejenis MPR di Belanda.....	319
4.3.2.4. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Lembaga Sejenis MPR di Thailand.....	324
4.3.3. Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945.....	330
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>351</b>
5.1. Kesimpulan.....	351
5.2. Saran/ Rekomendasi.....	356
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>360</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>378</b>